

NEGARA INDONESIA TIMUR TAHUN 1946- 1950

Agnes Fitria Susanti

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: Agneez_fi3@yahoo.co.id

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kuatnya pengaruh Belanda di Indonesia Bagian timur menyebabkan Belanda mendirikan sebuah negara boneka dengan nama Negara Indonesia Timur (NIT). NIT didirikan melalui sebuah konferansi yang diadakan di Malino dan Denpasar pada tahun 1946. Berdirinya NIT kemudian diikuti oleh pembantukan negara-negara bagian yang lainnya seperti Negara Sumatera Timur (NST), dan Negara Pasundan. NIT yang didirikan pertama kali dan dijadikan dasar penerapan sistem federal oleh Belanda, pada akhirnya membantu Republik Indonesia (RI) untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 melalui sebuah badan yang dibentuk Belanda yaitu Bijeenkoms voor Federal Overleg (BFO)

Latar belakang masalah diatas menimbulkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana latar belakang pembentukan Negara Indonesia Timur, bagaimana bentuk pemerintahan di Negara Indonesia Timur, bagaimana peranan Negara Indonesia Timur dalam membantu perjuangan RI mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda tahun 1949.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah mulai heuristik yaitu mengumpulkan beberapa sumber baik primer maupun sekunder, kritik melakukan analisa terhadap sumber yang telah didapat dalam proses heuristik, interpretasi yaitu menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lain dari sumber yang telah diperoleh dan dianalisa, dan historiografi yaitu tahapan penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui penerapan sistem federal di Indonesia. NIT adalah salah satu negara boneka yang dibentuk oleh Belanda dengan tujuan untuk memperlemah kedudukan RI. Belanda menjadikan NIT sebagai awal federalisme di Indonesia. Pada kenyataannya meskipun terjadi pertentangan dalam sistem pemerintahan NIT yang terbentuk pada tahun 1946 dan dibubarkan pada tahun 1950, pada kenyataannya NIT berusaha membantu Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sikap NIT yang ingin membentuk negara yang merdeka dan berdaulat bersama RI menyebabkan NIT menjadi negara pertama yang dibubarkan setelah sistem federal dihapuskan dan kembali ke negara kesatuan.

Kata kunci: NIT, BFO, dan pengakuan kedaulatan

Abstract

The strong influence of the Dutch in the eastern part of Indonesia led the Dutch established a puppet state under the name State of East Indonesia (NIT). NIT was founded through a konferansi held in Malino and Denpasar in 1946. Then followed by the establishment of NIT pembantukan states that other countries such as East Sumatra (NST), and State Pasundan. NIT was first established and used as the basis for the federal system by the Dutch, in turn helping the Republic of Indonesia (RI) for recognition of sovereignty in 1949 through an agency of the Dutch established Federal voor Bijeenkoms Overleg (BFO).

Background above problems pose some problem formulation that is how the background creating the State of East Indonesia, what form of government in the State of East Indonesia, how the role of the State in Eastern Indonesia to help Indonesia fight dari Dutch recognition of sovereignty in 1949.

The method used in this study using methods of historical research began collecting some heuristic that both primary and secondary sources, critical analysis of the sources that have been obtained in a heuristic, which connects

the interpretation of the facts with other facts from sources that have been obtained and analyzed, historiography and the writing stages of the research conducted.

The results of this study describes how the Dutch attempt to regain control of Indonesia through the implementation of a federal system in Indonesia. NIT is one of the puppet state set up by the Dutch in order to weaken the position of the Republic of Indonesia. Dutch made the NIT as early federalism in Indonesia. In reality though there is a contradiction in the government system NIT formed in 1946 and disbanded in 1950, in fact NIT trying to help Indonesia in the fight for recognition of the sovereignty of the Netherlands. NIT attitude who want to establish an independent and sovereign state with RI cause NIT became the first country to be dissolved after the federal system was abolished and a return to the unity of the country.

Key words: NIT, BFO, and recognition of sovereignty,

PENDAHULUAN

Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan [] kemerdekaan Indonesia, kemudian timbul konfrontasi antara Indonesia dan Belanda. Penyebab timbulnya konfrontasi tersebut dikarenakan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali berkuasa di Indonesia. Konfrontasi Belanda terhadap Republik Indonesia (RI) dilakukan dengan cara melemahkan kedudukan RI. Belanda berusaha mendirikan daerah – daerah otonom dan memprakarsai berdirinya negara-negara bagian atas wilayah yang telah didudukinya.

Ada 15 negara bagian dan daerah otonom yang didirikan atas prakarsa Belanda namun hanya ada tiga negara yang relatif kuat dari sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatera Timur (NST), dan Pasundan.¹ NIT berdiri di antara Belanda dan RI.² Dasar untuk kerja sama yang akan datang antara pemerintahan RI dengan pemerintahan NIT diletakkan dengan jalan bermusyawarah bersama tentang pemecahan secara damai persoalan Indonesia.³ Tujuan Belanda mendirikan negara bagian dan beberapa daerah otonom adalah untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia, dengan cara memfungsikan kembali alat kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu *Binnenlands Bestuur (BB)* dan *KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger)* di negara – negara dan daerah – daerah yang dibentuk Belanda. Kenyataan di Indonesia telah berdiri suatu negara yang merdeka yaitu RI, mendorong pihak Belanda untuk menerapkan sistem federal untuk wilayah Indonesia. Penerapan sistem pemerintahan federal bagi wilayah Indonesia dilakukan dengan cara mendirikan sebuah

negara federal yang diberi nama Negara Indonesia Serikat (NIS) dan menjadikan RI sebagai salah satu negara bagian di dalamnya bersama dengan negara – negara bagian yang telah didirikan oleh Belanda.

Setelah perundingan Linggarjati dilaksanakan Belanda hanya mau mengakui secara *de facto* Republik Indonesia atas daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda di Hoge Valuwe⁴ sebelumnya mengalami kegagalan, Van Mook berhasil memprakarsai berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) melalui konferensi di Malino dan Denpasar, tidak kalah penting konferensi di Pangkalpinang. Konferensi Pangkalpinang ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1946 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari golongan minoritas yaitu golongan peranakan Tionghoa, golongan peranakan Arab dan golongan Belanda (termasuk golongan Indo-Belanda). Konferensi Pangkalpinang menyetujui keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh konferensi Malino. NIT yang didirikan atas prakarsa Belanda dikemudian hari akan bekerjasama dengan RI untuk mewujudkan pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Latar belakang peneliti menulis karya ilmiah yang berjudul “Negara Indonesia Timur (NIT) tahun (1946-1950), karena kajian mengenai NIT sangat menarik, NIT yang pada awalnya sebuah negara yang dibentuk oleh Belanda namun pada akhirnya membantu RI untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Selain itu, penelitian yang menjelaskan tentang Negara Indonesia Timur secara rinci sangat jarang ditemui. Pada beberapa karya yang sudah pernah ada sebelumnya mengenai Negara Indonesia Timur (NIT) antara lain karya Ide Anak Agung Gde Agung yang berjudul “*Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia*

¹ George McT Kahin, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (terj. Nin Bakdi, Sumanto), Surakarta-Jakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, hlm. 552

² Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11*, Bandung : Angkasa, hlm. 234-235.

³ Ide Anak Agung Gde Agung, 1991, *Renville*, Jakarta : PT Sinar Agepe Press, hlm. 185-186

⁴ Selanjutnya disebut dengan perundingan Hoge Valuwe

Serikat” dan *Renville*”. kedua karya ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai Negara Indonesia Timur. Karya lain yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah tulisan karya A.B. Lopian dan P.J. Drooglever yang berjudul *“Menelusuri Jalur Linggarjati”*. Karya ini secara umum membahas mengenai ranah politik yang terjadi dalam persengketaan antara Indonesia dan Belanda, akan tetapi tidak banyak menyebutkan mengenai peranan NIT dalam membantu RI mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana latar belakang pembentukan Negara Indonesia Timur tahun 1946, bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Negara Indonesia Timur, dan bagaimana peranan Negara Indonesia Timur dalam membantu RI mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Peneliti melakukan penelitian dengan prosedur sesuai dengan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu *Heuristik* (penelusuran sumber), kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir Historiografi.

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah *heuristik*. Peneliti berusaha mencari sumber – sumber sejauh yang diperlukan. Pencarian sumber – sumber tersebut dilakukan diantaranya di Perpustakaan (Perpustakaan Nasional) Jakarta, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan pusat Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Sumber – sumber yang ditemukan dalam penelusuran di tempat tersebut diantaranya; Kahin George McT, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (terj. Nin Bakdi Sumanto, Surakarta-Jakarta : UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, Mohammad Roem, 1989, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta : PT. Gramedia. Perpustakaan Daerah Surabaya ditemukan sumber; Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Sumber yang ditemukan di Perpustakaan pusat UNESA diantaranya; A.B Lopian dan P.J. Drooglever, 1992, *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta : PT. Temprint, Ide Anak Agung Gde Agung, 1991, *Renville*. Jakarta : PT Sinar Agape Press. Nasution A.H. 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Bandung : Angkasa Bandung. Di Perpustakaan jurusan pendidikan sejarah UNESA ditemukan sumber diantaranya :

Kartodirdjo Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia Jil. VI*, Jakarta : Dep. P&K, dan Ricklefs, M.C. 1991, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Setelah proses *heuristik* selesai, maka proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan apakah sesuai (relevan) dengan apa yang akan diteliti hingga dari proses kritik sumber dapat ditemukan fakta – fakta sejarah yang berkaitan dengan Negara Indonesia Timur tahun 1946-1950.

Setelah fakta – fakta sejarah didapatkan dalam proses sebelumnya maka tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi yaitu dengan menghubungkan fakta – fakta yang telah didapatkan sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan sejarah sesuai dengan fakta yang didapatkan mengenai apa yang diteliti oleh penulis yaitu *“Negara Indonesia Timur Tahun 1946-1950”*. Setelah proses interpretasi selesai, maka selanjutnya adalah tahap penulisan sejarah yang lazim disebut dengan Historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA NIT

Latar belakang sejarah terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) tidak lepas dari aspek politik, pada awal dari rencana Belanda untuk menguasai kembali Indonesia mempergunakan berbagai macam cara. Cara-cara itu adalah politik *divide et impera*, dengan politik tersebut Belanda memecah belah wilayah Indonesia menjadi negara-negara kecil dan daerah-daerah otonom.

NIT berdiri pada tahun 1946 melalui berbagai konferensi, konferensi diantaranya adalah di Hoge Veluwe yang mengalami kegagalan (24 April 1946), Van Mook melakukan kegiatan berunding dengan “wakil-wakil rakyat” daerah-daerah yang dikuasainya. Berlawanan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan bentuk negara kesatuan, Van Mook menghendaki negara Indonesia merupakan negara federal/serikat. Pada tanggal 14 Juli 1946, pihak sekutu menyerahkan urusan keamanan daerah di luar Jawa dan Sumatra kepada Belanda, maka keesokan harinya dengan segera Van Mook melangsungkan suatu konferensi di Malino (Sulawesi Selatan) yang berakhir pada

tanggal 25 Juli 1946. Konferensi ini membicarakan bagaimana daerah-daerah itu akan diberi tempat yang layak di dalam susunan ketatanegaraan yang baru, yang sesuai dengan selera Belanda. Setelah berhasil mengadakan konferensi Malino untuk golongan pribumi, pada tanggal 1 Oktober 1946 diadakan lagi konferensi di Pangkalpinang yang dihadiri oleh wakil-wakil dari golongan minoritas yaitu golongan peranakan Tionghoa, golongan peranakan Arab, dan golongan Belanda. Konferensi Pangkalpinang memutuskan menyetujui keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh konferensi Malino. Setelah konferensi Malino dan Konferensi Pangkalpinang menyusul konferensi yang diadakan di Denpasar, Bali. Konferensi ini dimulai pada tanggal 7 Desember 1946 yang membicarakan status Timur Besar di dalam ketatanegaraan yang baru. Konferensi yang berlangsung sampai 23 Desember 1946 itu juga diketuai oleh Van Mook. Pada tanggal 24 Desember 1946 berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang telah diterima dalam konferensi diumumkanlah berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) yang meliputi bekas wilayah Timur Besar kecuali Irian Barat. Pada tanggal 15 November 1946 telah tercapai persetujuan antara Indonesia dan Belanda sebagai hasil perundingan di Linggarjati. Persetujuan Linggarjati secara resmi disepakati kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947.

Republik Indonesia terus memperjuangkan pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda melalui jalur diplomasi. NIT yang dibentuk oleh Belanda dengan tujuan awal sebagai dasar penerapan sistem federal di Indonesia di kemudian hari membina sebuah hubungan bilateral dengan pemerintah RI. Sejak tahun 1948 NIT dan RI semakin mempererat hubungannya sehingga terjamin suatu komunikasi politik diantara keduanya.

2. BENTUK PEMERINTAHAN NIT

Bentuk pemerintahan NIT adalah federal. Van Mook telah memberikan uraian bahwa baik buruknya kedua bentuk negara tersebut antara lain menyatakan bahwa sebuah negara kesatuan kurang mahal dan menuntut tenaga-tenaga pimpinan yang lebih sedikit dibandingkan dengan suatu federasi. Berbahaya bahwa di dalam negara kesatuan itu beberapa bagian akan menguasai keseluruhannya. Selanjutnya perpecahan di

dalam akan dapat membahayakan kesatuan. Sebaliknya di dalam federasi kehidupan bagian-bagian sendiri dapat terjamin, oleh karena itu bahaya demikian dapat dihindari.

3. PERANAN NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT)

Peranan NIT sangat membantu dalam perjuangan memperoleh kedaulatan RI.

A. Penolakan Negara Indonesia Timur terhadap rencana Beel.

Pada pertengahan Agustus pemerintah Belanda mengeluarkan RUU yang bertujuan untuk menetapkan aturan mengenai ketatanegaraan Indonesia selama masa peralihan. Pemerintah NIT melalui perdana menteri Ide Anak Agung Gde Agung kembali memberikan kritik yang tajam atas RUU tersebut. Anak Agung Gde Agung berpendapat bahwa RUU tersebut terlalu banyak menyimpang dari resolusi Bandung.

B. Dipulihkannya Pemerintahan RI di Yogyakarta.

Setelah kedudukan Belanda mulai terdesak oleh resolusi dewan keamanan PBB untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan Indonesia, Beel berusaha mencari cara untuk menghindari resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB dan beberapa negara di Asia maupun Amerika tersebut.

KESIMPULAN

NIT berdiri pada tahun 1946 melalui berbagai konferensi, konferensi diantaranya adalah di Hoge Veluwe, konferensi Malino, konferensi Pangkalpinang, konferensi Denpasar, konferensi Linggarjati.

NIT dibubarkan pada tahun 1950 karena Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke dalam bentuk negara kesatuan RI.

DAFTAR PUSTAKA

Koran

Pedoman Nusantara tahun 1947

Negara Baru tahun 1947

Buku

A.B Lopian dan P.J Drooglever, 1992, *Menelusuri Jalur Linggarjati, Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

- Aminudin Kasdi, 2008, *Memahami Sejarah Surabaya* : Unesa University Press
- Anhar Gonggong, 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar : Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta : Ombak
- . Anwar Arifin, 1990, *Pers dan Dinamika Politik di Makassar*. Ujung Pandang : Unhas
- Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- _____, 1991, *Renville*, Yogyakarta : Pustaka Sinar
- _____, 1995, *Pernyataan Rum-Roijen*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka-Sebelas Maret University Press Harapan
- Kahin, George McT., 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (terj. Nin Bakdi, Sumanto), Surakarta-Jakarta:UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan

